

ANALISA PEMERINTAHAN SUMATERA BARAT TERKAIT ANCAMAN PENGANGGURAN PASCA KENAIKAN INFLASI

Hery Haryanto¹, Junestin², Andriani Fahira³, Chairunisa Aj Reqha⁴,
Putri Surya Sri Rahayu⁵, Nancy⁶

Email: hery.haryanto@uib.edu¹, 2141304.junestin@uib.edu², 2141109.andriani@uib.edu³,
2141053.chairunisa@uib.edu⁴, 2141043.putri@uib.edu⁵, 2141275.nancy@uib.edu⁶

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Alamat: Baloi-Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam,
Kepulauan Riau 29426

ABSTRACT

Inflation, unemployment, and economic growth are indicators of macroeconomics where macroeconomics is the study of economic activity in a country or region. This analysis will focus on unemployment after rising inflation in a province in Indonesia. The subject of the analysis chosen was West Sumatra, which is one of the provinces that has a fairly high unemployment rate in Indonesia. The research methods used are qualitative and quantitative techniques, the data that will be used later are unemployment rate data, inflation data and government policies. The purpose of this study is to find out how much the increase in unemployment from 2019 to 2020 occurred in one of the provinces in Indonesia, namely West Sumatra.

Keywords: Unemployment, Inflation, West Sumatra

1. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan suatu konflik yang dimiliki hampir oleh seluruh negara yang ada, baik itu negara maju ataupun negara berkembang. Pengangguran adalah kondisi dimana seseorang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang bekerja akan tetapi kurang dari waktu kerja. Pengangguran juga merupakan permasalahan yang terjadi hampir di seluruh negara, dan dapat dikatakan bahwa pengangguran adalah permasalahan yang tidak dapat dihindari dan tiada akhirnya. Dengan meningkatkan jumlah pengangguran maka akan menyebabkan meningkatnya juga tingkat kemiskinan, kriminalitas, dan juga akan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat ekonomi suatu negara atau daerah tersebut.

Pengangguran bukan lah hal yang tabu lagi di Indonesia, negara maju yang terdiri dari banyak sekali provinsi. Salah satunya adalah provinsi Sumatera Barat, provinsi yang berada di posisi ke 3 dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan penyebabnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan, serta pada awal tahun 2020 terjadinya wabah Covid-19 yang menyebabkan banyak sektor usaha yang tutup dan perseroan serta perusahaan besar yang melakukan PHK kepada karyawannya, sehingga terjadinya peningkatan tingkat pengangguran lagi di tahun 2020. Selain itu dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja per tahunnya dan semakin besarnya biaya hidup lah yang semakin menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. pada analisis kali ini akan dibahas tentang kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi di indonesia khususnya di provinsi Sumatera Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengangguran

Pengangguran berkaitan dengan ketenagakerjaan, pengangguran sendiri artinya adalah situasi dimana masyarakat dalam kategori tenaga kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Pengangguran ini salah satu permasalahan terbesar yang dialami negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Masalah pengangguran di negara-negara berkembang ini merupakan masalah ekonomi makro yang dapat menghambat pembangunan suatu daerah karena dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan. Berikut adalah jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya :

a. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklis merupakan pengangguran yang disebabkan dari dampak naik turunnya perekonomian suatu negara. Contohnya seperti adanya krisis global dan pandemi *Covid-19* sekarang ini yang menyebabkan perekonomian suatu negara menurun sehingga menyebabkan pengangguran terjadi.

b. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional ialah pengangguran yang terjadi akibatnya ada perubahan bidang kerja yang menyebabkan hambatan. Contoh dari pengangguran friksional seperti orang yang berhenti dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain dengan bidang berbeda karena proses tersebut membuat keterhambatan yang menyebabkan pengangguran.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran Struktural yaitu pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur kehidupan masyarakat dan perubahan pada perekonomian. Contoh dari pengangguran struktural seperti kemajuan teknologi yang menyebabkan buruh tani menganggur akibat kemunculan traktor di sektor pertanian.

d. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman terjadi akibat pergantian musim seperti melakukan pekerjaan di saat musim tertentu saja. Contoh dari pengangguran musiman ini ketika turunnya minat wisatawan untuk berwisata dikala *Covid-19* ini yang menyebabkan tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata mengalami keterhambatan yang menyebabkan pengangguran terjadi.

2.2 Inflasi

Seperti di negara berkembang pada umumnya, fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi salah satu dari beberapa 'penyakit' makro ekonomi yang melanda pemerintah, khususnya penduduk Indonesia. Inflasi merupakan kenaikan nilai mata uang terhadap barang dan jasa secara terus menerus. Laju inflasi ialah salah satu indikator penting yang dapat memberitahu kita tentang dinamika pergerakan harga barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk suatu negara. Inflasi tidak hanya berdampak negatif saja tetapi ada dampak positifnya seperti dengan adanya gambaran dari nilai inflasi dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk mempertimbangkan suatu decision making. Selain itu juga dipakai kontrak suatu bisnis yang menggambarkan kondisi perekonomian suatu Negara.

2.3 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan atau tahap-tahap yang dibuat oleh otoritas moneter untuk pengendalian suku bunga dalam mencapai perkembangan perekonomian yang telah ditargetkan oleh suatu negara. Kebijakan moneter juga mempengaruhi perkembangan harga aset lainnya, baik aset finansial seperti obligasi dan saham, maupun aset riil, terutama harga *real estate* dan emas. Tindakan-tindakan ini dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam mencapai

stabilitas perekonomian yang dapat diukur dari stabilnya harga atau tidak, kesempatan dalam pekerjaan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Berikut merupakan

2 jenis kebijakan moneter:

a. Kebijakan Moneter Kontraktif

Yang dimaksud dengan kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada saat kondisi ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda inflasi yang melampaui batas untuk menjamin stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan moneter kontraktif melemahkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan menaikkan suku bunga yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar agar pertumbuhan ekonomi tidak terlalu panas dan terkendali

b. Kebijakan Moneter Ekspansif

Yang dimaksud dengan kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan untuk memulihkan kondisi ekonomi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat resesi. menjelaskan bahwa kebijakan moneter ekspansif ini umumnya ditandai dengan penurunan tingkat bunga pembayaran wajib, yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas bisnis dan daya beli masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Pengangguran adalah sekelompok orang yang belum bekerja dan belum melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data inflasi dan deflasi untuk menjelaskan dampak pengangguran yang terjadi akibat inflasi dan deflasi. Hasil analisis inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika inflasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Pengangguran berpengaruh negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika pengangguran tinggi maka pertumbuhan ekonomi juga akan rendah ataupun sebaliknya.

3.2 Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian ini kami menggunakan metode explanatory research. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari pengangguran pasca kenaikan inflasi saat ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan induktif. Dengan menganalisa kebijakan pemerintah terkait pengangguran pasca kenaikan inflasi serta penyebab terjadinya inflasi pengangguran.

3.3 Sumber Data

Penulis mengumpulkan data dari sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah ada pada hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sehingga data tersebut bersumber dari dokumen organisasi tersebut yang dianggap berkaitan atau relevan dengan masalah yang di bahas. Data ini penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Sumatera Barat, Jurnal yang terkait, Website Sensus Penduduk, Website yang relevan, sumber-sumber penelitian referensi dan hal-hal lain yang mendukung penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*) dimana data yang penulis dapatkan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam tahap ini, penulis juga menggabungkan semua data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang terkumpul yaitu inflasi dan jumlah pengangguran di kota Sumatera Barat pada tahun 2019-2020.

3.5 Tahap Analisa Data

Berdasarkan analisa data yang penulis peroleh dari, “Analisis Pemerintah Sumatera Barat. Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi”. Pada beberapa permasalahan yang dihadapi ditemukan bahwa tingkat inflasi cukup rendah. Pada tahap ini penulis akan menganalisa dan mendeskripsikan lebih detail data yang telah diperoleh dari beberapa fakta. Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh penulis, penulis membuat rincian berupa tabel yang berisi jumlah penduduk, persentase pengangguran, jumlah pengangguran dan peningkatan inflasi di Kota Sumatera Barat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel dibawah ini menurut Badan Pusat Statistik tingkat inflasi tertinggi di Sumatera Barat pada tahun 2019 di kota Padang senilai 1,72% dan di Kota Bukit Tinggi 1,31% sedangkan ditahun 2020 masing-masing kota 2,12% dan 2,02%. Tingkat inflasi di Sumatera Barat ditahun 2019 senilai 1,66% dan terjadi peningkatan di tahun 2020 yang mencapai 2,11%.

Tabel 1. Tingkat Inflasi di Sumatera Barat

Kota Inflasi	Inflasi Tahunan Sumatera Barat	
	2019	2020
Kota Padang	1.72	2.12
Kota Bukittinggi	1.31	2.02
Gabungan 2 Kota (Padang dan Bukittinggi)	1.66	2.11

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berikut ini inflasi yang terjadi di Sumatera Barat tahun 2019-2020 Menurut Bank Indonesia :

- Pada triwulan IV 2020, inflasi meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. HBKN (Hari Raya Keagamaan Nasional) Q4 2020 Akibat meningkatnya permintaan Natal dan Tahun Baru, laju inflasi Sumbar 2,11% yoy, 0,16% lebih tinggi dari laju inflasi Q3, Q4 2020 Inflasi terutama didorong oleh inflasi makanan, minuman dan tembakau, yang menyumbang 1,44% year-over-year. Inflasi di sektor ini terutama disebabkan oleh terbatasnya pasokan dan meningkatnya permintaan bahan makanan seperti cabai merah, fetai, udang basah, anemon/aso selama Natal dan Tahun Baru 2021. Dan, karena tingginya harga komoditas telur ayam dan kondisi cuaca yang tidak musiman di akhir tahun 2020, harga hasil laut mengalami kenaikan. Pada triwulan IV 2020, inflasi didominasi oleh deflasi di sektor informasi, telekomunikasi, dan jasa keuangan. Akibatnya, deflasi turun -0,07% (tahun/tahun), dan deflasi kelompok ini tercatat pada pulsa. Hal ini disebabkan adanya penawaran diskon di tengah aktivitas online yang tinggi.
- Inflasi di Sumatera Barat tercatat sebesar 2,11% (y/y) pada tahun 2020 dari 1,67% (y/y) pada tahun 2019.), namun tetap berada dalam target inflasi nasional tahun

2020 sebesar 3±1%. Pertumbuhan inflasi pada tahun 2020 didorong oleh inflasi tahun dasar yang lebih rendah pada tahun 2019 dan harga pangan yang lebih tinggi. Apalagi di awal dan akhir tahun 2020.

- Tekanan inflasi pada Q1 2021 diperkirakan akan ringan dibandingkan Q4 2020 karena harga dan permintaan umum kembali normal setelah HBKN. Pelonggaran inflasi didorong oleh permintaan yang kembali normal setelah Natal. Di tahun baru, kemungkinan besar HBKN akan menekan harga barang konsumsi dan jasa transportasi seperti tiket pesawat. Cuaca yang baik di Q1 2021 membantu menstabilkan harga pangan. Secara khusus, cabai dan bawang merah diperkirakan akan menurun akibat curah hujan yang tinggi pada triwulan sebelumnya.
- Rasio CPI Q2 2021 diperkirakan akan lebih tinggi dari perkiraan inflasi Q1 2021. Meningkatnya tekanan inflasi diperkirakan akan didorong oleh meningkatnya permintaan HBKN Idul Fitri secara umum. Periode 2020 juga membantu mendorong tingkat inflasi tahunan untuk Q2 2021 dalam kondisi cuaca. sementara, yang dapat terjadi pada Mei 2021, telah menimbulkan kekhawatiran tentang kegagalan panen pangan dan dapat mengubah musim tanam di beberapa daerah.

Tabel 2. Tingkat Pengangguran di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	
	2019	2020
Kab. Kepulauan Mentawai	2.92	3.98
Kab. Pesisir Selatan	6.02	7.00
Kab. Solok	4.72	4.65
Kab. Sijunjung	3.64	5.30
Kab. Tanah Datar	3.20	4.79
Kab. Padang Pariaman	6.08	8.13
Kab. Agam	4.78	4.61
Kab. Lima Puluh Kota	2.30	3.03
Kab. Pasaman	5.28	5.04
Kab. Solok Selatan	4.91	5.62
Kab. Dharmasraya	5.06	5.31
Kab. Pasaman Barat	4.74	4.69
Kota Padang	8.74	13.64
Kota Solok	7.06	8.35
Kota Sawahlunto	6.84	8.20
Kota Padang Panjang	4.38	7.22
Kota Bukittinggi	6.20	7.51
Kota Payakumbuh	4.13	6.68
Kota Pariaman	5.48	5.73
Provinsi Sumatera Barat	5.38	6.88

Tingkat pengangguran tertinggi di Sumatera Barat terjadi di Kota Padang pada tahun 2019 senilai 8,74% dan di tahun 2020 13,64%. Sedangkan tingkat pengangguran terendah berada di Kab. Kepulauan Mentawai senilai 2,92% dan di tahun 2020 di Kab. Lima Puluh Kota sebesar 3,03%. Total pengangguran di tahun 2019 yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat 5,38% dan terjadi peningkatan pengangguran di tahun 2020 yaitu 6,88%.

Hubungan Pengangguran dengan Kenaikan Inflasi

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa saat tingkat pengangguran menurun di bawah tingkat tertentu, hal ini biasanya disebut tingkat alami, tingkat inflasi akan cenderung naik terus menerus hingga tingkat pengangguran kembali pada tingkat alaminya. Jika tingkat

pengangguran meningkat di atas tingkat alami, maka tingkat inflasi akan cenderung melambat. Tingkat pengangguran alami merupakan tingkat pengangguran yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi berlanjut. Tingkat pengangguran di bawah tingkat alami mempercepat pertumbuhan ekonomi dibanding tingkat maksimum yang berlanjut, sehingga menjadi penyebab meningkatnya inflasi karena tekanan ke atas pada upah dan harga secara umum. Tingkat inflasi adalah ekspektasi inflasi dan perubahan tak terduga dalam penawaran barang dan jasa yang terjadi di Sumatera Barat. Ekspektasi inflasi memainkan peran penting dalam tingkat inflasi yang sebenarnya, karena individu memasukkan ekspektasi inflasi mereka ketika membuat keputusan penetapan harga atau ketika menawar upah. Perubahan ketersediaan barang dan jasa yang digunakan sebagai input dalam proses produksi (misalnya, minyak) umumnya berdampak pada harga akhir barang dan jasa dalam perekonomian, dan karenanya mengubah tingkat inflasi. Tingkat pengangguran alami tidak berubah dan berfluktuasi seiring dengan perubahan dalam perekonomian. Misalnya, tingkat pengangguran alami dipengaruhi oleh: perubahan demografi, pencapaian pendidikan, dan pengalaman kerja angkatan kerja; institusi (misalnya, program pemagangan) dan kebijakan publik (misalnya, asuransi pengangguran); perubahan dalam pertumbuhan produktivitas; dan tingkat pengangguran jangka panjang saat ini dan sebelumnya.

Upaya Pemerintah Menanggulangi Pengangguran

Cara yang paling efektif yang harus dilakukan pemerintah di Sumatera Barat adalah Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan. Meningkatkan tingkat keterampilan dan mengakses pelatihan dan pendidikan terakreditasi adalah tujuan utama bagi banyak pencari kerja sambil menunggu pemulihan di pasar kerja. Dukungan untuk pencari kerja telah direvisi di bawah Kembali ke Pendidikan dan program dukungan pelatihan lainnya, bekerja sama dengan Departemen Pendidikan, Solas dan Badan Pendidikan dan Pelatihan, untuk memastikan kursus pendidikan dan pelatihan yang diikuti selaras dengan kebutuhan keterampilan masa depan dari ekonomi dan kesempatan kerja yang muncul. Di bawah Momentum, sekitar 8.000 tempat pelatihan telah disediakan untuk pencari kerja jangka panjang. Perbaikan telah dilakukan dalam peluncuran pusat Intreo dalam mendukung pencari kerja yang ingin mempertimbangkan peluang pendidikan dan pelatihan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Provinsi Sumatera Barat, salah satunya Kota Padang menjadi provinsi dan kota yang memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terutama pada saat pandemi COVID-19 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan analisa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, Provinsi Sumatera Barat menduduki urutan ke 8 dengan tingkat pengangguran yang tinggi yaitu sebesar 6,52%. Pemerintah setempat mengadakan kegiatan guna mengatasi pengangguran yang ada, yaitu program dukungan pelatihan dan pendidikan terakreditasi, bekerja sama dengan Departemen Pendidikan, Solas dan Badan Pendidikan dan Pelatihan. Di bawah Momentum, sekitar 8.000 tempat pelatihan telah disediakan untuk pencari kerja jangka panjang. Kegiatan ini merupakan revisi dari solusi dalam mengatasi pengangguran sebelumnya. Perbaikan telah dilakukan dalam peluncuran pusat Intreo dalam mendukung pencari kerja yang ingin mempertimbangkan peluang pendidikan dan pelatihan. Rekomendasi yang dapat kami lampirkan adalah pemerintah Sumatera Barat belum berperan maksimal dalam program ini, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat tahu akan adanya kegiatan ini, penyebabnya adalah minimnya informasi yang didapat oleh masyarakat terkait informasi lapangan pekerjaan dan juga program dari pemerintah seperti pelatihan, hal ini disebabkan dengan sosialisasi yang belum menyeluruh.

Sehingga pemerintah setempat perlu menekankan kegiatan sosialisasi terkait informasi lapangan pekerjaan dan pelatihan ini agar pengimplementasian kegiatan ini terlaksana dengan baik dan menyeluruh di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Sopianti, N.K. (no date) 'E-Jurnal EP Unud, 2 [4] : 216-225', *E-Jurnal Ep Unud* , 2(4), p. 216225.

15656-Article Text-15654-1-10-20080902. (n.d.).

<i>Julioe,</i>	<i>R.</i>	<i>(2017)</i>	<i>'No</i>
<i>TitleÉ?_____</i>			

', *Ekp*, 13(3), pp. 1576–1580.

Siswoyo, S. and Asrini, A. (2020) 'Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Provinsi di Sumatera', *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 5(2), p. 309. Available at: <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.201>.

Martilova, N. and Doni, A.H. (2020) 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Dan Inflasi Terhadap Investasi Di Sumatera Barat', *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 4(1), p. 21. Available at: <https://doi.org/10.31958/imara.v4i1.1996>.

Siskawati, N. and Zulfhi Surya, R. (2021) 'Pengaruh Harapan Lama Sekolah, Rata – Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten / Kota Provinsi Riau', *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 7(3), pp. 173–177. Available at: <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v7i3.231>.

Warjiyo, P. (2007) 'Stabilitas Sistem Perbankan Dan Kebijakan Moneter : Keterkaitan Dan Perkembangannya Di Indonesia', *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 8(4), pp. 429–454. Available at: <https://doi.org/10.21098/bemp.v8i4.144>.

Salim, J.F., Kebijakan, P. and Salim, J.F. (2017) 'EKONOMI', III(2), pp. 68–76.

<https://sumbar.bps.go.id/indicator/3/172/1/inflasi-tahunan-sumatera-barat.html>

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Barat-Februari-2021.aspx#:~:text=Inflasi%20Sumatera%20Barat%20pada%20tahun,%2C67%25%20\(yoy\)](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Barat-Februari-2021.aspx#:~:text=Inflasi%20Sumatera%20Barat%20pada%20tahun,%2C67%25%20(yoy).).